

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan di instansi pemerintahan. LPJ berfungsi sebagai dokumen yang memuat rincian penggunaan anggaran yang telah disetujui, sehingga memungkinkan pengawasan dan akuntabilitas atas dana yang dikelola (Khusaini, 2019). Proses penyusunan LPJ keuangan mencakup serangkaian langkah yang harus diikuti untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Proses dalam penyusunan LPJ saat ini semakin dimudahkan dengan memanfaatkan teknologi kontemporer. Teknologi informasi dapat memberikan solusi signifikan terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaporan. Penerapan sistem manajemen yang berbasis teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan LPJ (Nurfi & Syafina, 2024). Sistem manajemen yang terkomputerisasi dapat memudahkan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan penggunaan anggaran secara *real-time*. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalisir kesalahan manusia dalam proses penyusunan laporan.

Lebih lanjut, manajemen penyusunan LPJ sepatutnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, khususnya terkait dengan pelaporan keuangan publik. Keuangan publik yang dimaksudkan adalah pertanggungjawaban

penggunaan anggaran oleh entitas publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Djanegara, 2017). Tujuan utama dari pelaporan keuangan publik adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang baik dalam penggunaan dana publik (Puspa & Prasetyo, 2020).

Menelaah uraian di atas, maka dipahami bahwa penyusunan LPJ keuangan pada institusi publik sangat penting dilakukan. Adapun proses penyusunan yang terjadi pun perlu memperhatikan tata kelola yang sesuai. Sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, bahwa entitas publik diantaranya adalah pemerintah daerah, yang di dalamnya memuat berbagai elemen untuk pelaksanaan tata tertib pemerintahan guna mencapai tujuan yang dicanangkan. Salah satu entitas publik dalam pemerintahan daerah adalah dinas pendidikan, yang mengelola pendidikan di daerah tersebut, baik pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada konteks Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penyusunan LPJ yang tepat dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disediakan untuk berbagai program pendidikan digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu tugas utama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah mengelola anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pengelolaan anggaran ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Proses pelaporan keuangan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara sah (Sudaryo, Sjarif, & Sofiati, 2021).

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran yang cukup besar untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pendidikan. Melalui anggaran yang besar, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melaporkan penggunaan dana, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengelolaan anggaran di masa mendatang (Kawatu, 2019).

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, dilakukan studi pendahuluan terkait dengan sistem manajemen pelaporan pertanggungjawaban keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum diperoleh informasi bahwa sistem manajemen pelaporan keuangan telah berjalan, dalam prosesnya sistem manajemen yang berjalan melibatkan berbagai pihak. Diantara pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah Kepala Dinas Pendidikan selaku pejabat pengguna keuangan, kepala bidang yang ada di Dinas Pendidikan selaku kuasa pengguna keuangan, kepala seksi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pada masing-masing bidang, serta staff administrasi pada masing-masing bidang sebagai pelaksana kegiatan.

Pada pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, melalui pengamatan awal dipahami bahwa manajemen proses penyusunan LPJ di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sering menghadapi berbagai kendala. Beberapa diantaranya adalah keterlambatan dalam penyusunan laporan, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kendala-

kendala ini tidak hanya menghambat jalannya program-program pendidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah dalam hal audit dan pengawasan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, maka tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun LPJ keuangan setidaknya terdapat empat poin utama. Pertama, kompleksitas administrasi karena proses penyusunan laporan keuangan melibatkan banyak dokumen dan data yang harus diolah dengan cermat. Kesalahan kecil dalam penginputan data bisa berdampak besar pada keseluruhan laporan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan seringkali kurang memadai dari aspek kompetensi. Hal ini dapat menghambat proses penyusunan laporan yang efektif dan efisien. Ketiga, penggunaan teknologi yang belum optimal, masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan laporan keuangan. Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal seringkali menyebabkan keterlambatan dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Keempat, regulasi yang berubah-ubah, peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan sering mengalami perubahan. Adaptasi terhadap perubahan regulasi ini membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit.

Oleh karena itulah, maka sistem manajemen yang efektif penting dimiliki untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik. Pada era digital, adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan menjadi sebuah keharusan. Sistem manajemen yang baik akan membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap pengelolaan keuangan negara.

Lebih lanjut, dengan adanya sistem manajemen yang baik, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Kondisi ini tidak hanya akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Selain itu, dengan adaptasi teknologi yang tepat, proses penyusunan laporan dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang lebih baik dan lebih transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran di sektor pendidikan. Untuk melakukan pendalaman tentang penelitian yang akan dilakukan, maka disusun dalam narasi judul “sistem manajemen penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti atau pokok bahasan utama dari sebuah penelitian. Fokus ini menetapkan area spesifik yang akan diteliti dan memberikan gambaran umum tentang topik utama yang menjadi pusat perhatian peneliti (Sidiq, Choiri, & Mujahidin, 2019). Menelaah latar belakang penelitian, maka fokus penelitian ini adalah sistem manajemen penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

1.2.2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian merupakan bagian-bagian atau aspek-aspek spesifik yang lebih rinci dari fokus utama. Subfokus membantu memperjelas area yang lebih spesifik dalam fokus utama yang akan diteliti lebih mendalam (Siregar & Harahap, 2019). Adapun pada penelitian ini yang menjadi subfokus penelitian adalah sistem manajemen penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berlaku, kelemahan penggunaan sistem manajemen yang berlaku, alternatif solusi untuk mengatasi kelemahan sistem manajemen pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan sub-fokus pada penelitian ini, maka rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem manajemen penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi) di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa kelemahan dari penggunaan sistem manajemen penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku?
3. Apa alternatif solusi untuk mengatasi kelemahan sistem manajemen pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Sistem manajemen penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi) di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kelemahan dari penggunaan sistem manajemen penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku
3. Alternatif solusi untuk mengatasi kelemahan sistem manajemen pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian yang berkontribusi dalam pemahaman tentang sistem manajemen laporan pertanggungjawaban keuangan pada institusi publik, sehingga dapat menjadi rujukan untuk menelaah secara mendalam berbagai hal yang terkait dengan keuangan publik.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan pelaporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, khususn untuk pihak-pihak berikut:

a. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini menjadi bagian evaluasi diri, khususnya pada sistem manajemen pelaporan keuangan sehingga pada masa yang akan datang dapat dilakukan penyesuaian pada aspek-aspek yang masih dianggap kurang optimal.

b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini menjadi bukti otentik untuk memperkuat sistem manajemen pelaporan keuangan di lembaga pemerintahan, khususnya di Dinas Pendidikan. Pada akhirnya dapat menentukan kebijakan yang tepat sasaran guna mencapai *good governance*.

c. Peneliti Lain dan Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan atau penelitian sejenis, serta menambah wawasan akademisi tentang penerapan manajemen pelaporan keuangan publik di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.